

**KEKUATAN BAHASA DALAM MEMENGARUHI PERSEPSI: ANALISIS
SEMANTIK DAN PRAGMATIK TERHADAP ISU IJAZAH JOKOWI
DI MEDIA DIGITAL*****THE POWER OF LANGUAGE IN INFLUENCING PERCEPTION: A SEMANTIC AND
PRAGMATIC ANALYSIS OF THE ISSUE OF JOKOWI DIPLOMA IN DIGITAL MEDIA***

Andi Muhammad Nur¹
Universitas Pancasila¹
email:
andi.muhnur@unpacti.ac.id

Yuyun Muftadisa²
Universitas Pancasila²
email:
Yuyunmuftadisa2609@gmail.com

**Zulfani Zalsabila
Takbir³**
Universitas Pancasila³
email:
zulfani53858@gmail.com

Fradini Ilham⁴
Universitas Pancasila⁴
email:
fradiniilham7@gmail.com

**Maria Delastrada
Niam⁵**
Universitas Pancasila⁵
email:
mariadelastradan@gmail.com

**Maria Iramaya
Mamut⁶**
Universitas Pancasila⁶
email:
mariairamaya213@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 5, No. 3, pp. 348-358
Juli 2025



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Bahasa memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial dan persepsi publik, terutama di media digital yang kini menjadi ruang utama wacana politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan eufemisme dalam teks media digital terkait isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah isu sensitif yang terus mencuat sepanjang masa kepemimpinannya. Tujuannya adalah mengidentifikasi bentuk eufemisme yang digunakan serta menganalisis fungsinya dalam membingkai opini publik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode analisis wacana semantik, data diperoleh secara purposif dari dua sumber: berita daring dan kanal *You Tube*, mewakili media arus utama dan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eufemisme muncul dalam bentuk litotes, metafora, flipansi, teknikalitas, dan pengalihan fokus. Strategi ini digunakan untuk menyamarkan makna, menjaga citra tokoh publik, dan membentuk opini masyarakat secara halus dan terarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eufemisme bukan sekadar gaya bahasa, tetapi juga alat kekuasaan yang digunakan media untuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu politik. Pemahaman terhadap strategi ini penting untuk meningkatkan literasi kritis masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital.

Kata Kunci: Eufemisme; Media Digital; Wacana Politik; Analisis Wacana; Literasi Kritis.

Abstract: Language plays an important role in shaping social reality and public perception, especially in digital media, which has now become the main arena for political discourse. This study aims to examine the use of euphemisms in digital media texts related to the issue of the authenticity of President Joko Widodo's diploma, a sensitive issue that has continued to surface throughout his leadership. The objective is to identify the forms of euphemisms used and analyze their functions in framing public opinion. Using a descriptive qualitative approach and semantic discourse analysis methods, data were purposefully collected from two sources: online news and YouTube channels, representing mainstream and alternative media. The results of the study show that euphemisms appear in the form of litotes, metaphors, flipans, technicalities, and shifts in focus. These strategies are used to obscure meaning, maintain the image of public figures, and shape public opinion in a subtle and targeted manner. This study concludes that euphemisms are not merely a stylistic device but also a tool of power used by the media to influence public perception of political issues. Understanding these strategies is crucial for enhancing critical literacy among the public in consuming information in the digital age.

Keywords: Euphemism; Digital Media; Political Discourse; Discourse Analysis; Critical Literacy.

PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi antarmanusia, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang mampu memproduksi, mereproduksi, dan

merekonstruksi realitas sosial dalam masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, bahasa memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi, legitimasi, serta pengetahuan publik terhadap isu-isu yang

berkembang. Sebagaimana ditegaskan oleh Pamungkas, dkk (2024), bahasa dalam media massa tidak pernah netral, karena setiap kata, frasa, dan struktur kalimat yang dipilih menyimpan makna ideologis tertentu. Hal ini menjadi semakin signifikan dalam lanskap media digital yang memungkinkan penyebaran pesan berlangsung secara cepat, masif, dan lintas batas sosial.

Ruang wacana digital, berbagai isu politik sering kali dibingkai dengan strategi kebahasaan tertentu guna memengaruhi cara pandang publik. Salah satu strategi linguistik yang paling banyak digunakan adalah eufemisme, yakni penggunaan bentuk-bentuk ungkapan yang lunak, tidak langsung, atau metaforis sebagai pengganti dari ungkapan yang dianggap kasar, kontroversial, atau berpotensi menimbulkan konflik. Allan & Burridge (1991) menyatakan bahwa eufemisme bukan hanya gaya bahasa, tetapi juga merupakan mekanisme psikologis, sosial, dan politik untuk mengatur makna dan mereduksi dampak dari suatu informasi. Dari sisi linguistik, eufemisme bukan semata-mata perubahan makna, namun juga sebagai alat penghalus makna, Azaky & Mulya, (2024). Perubahan makna dapat berupa penyempurnaan makna dan pengurangan makna, dan perubahan bahasa dapat terjadi pada masyarakat yang mendukung perkembangan sosial, budaya, dan teknologi, Heryana dalam (Mardhiah, 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap eufemisme tidak hanya menyangkut aspek linguistik, tetapi juga menyentuh persoalan ideologi, kekuasaan, dan pembentukan opini publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa praktik eufemisme memainkan peran penting dalam wacana media. Misalnya, Sariah (2017) mengungkap bahwa eufemisme digunakan secara sistematis oleh Koran Tempo untuk membingkai isu politik secara halus demi menjaga stabilitas narasi dan menghindari konfrontasi langsung. Penelitian lain oleh Az-zahra, dkk (2021) pada

pemberitaan krisis kemanusiaan di Wamena menunjukkan bahwa eufemisme tidak hanya mengurangi dampak emosional berita, tetapi juga dapat mengaburkan fakta-fakta yang krusial. Selain itu, Yulianti & Supriyadi (2020) dalam kajiannya tentang strategi semantik di media massa menyimpulkan bahwa pilihan kata dalam pemberitaan tidak lepas dari kepentingan institusional media untuk memengaruhi persepsi khalayak. Hal serupa ditegaskan oleh Santoso (2021), yang mencatat bahwa pembingkai isu secara semantis dalam berita daring dapat secara signifikan memengaruhi resepsi audiens terhadap realitas politik.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa praktik eufemisme dalam wacana media bukan sekadar strategi linguistik, melainkan merupakan bagian integral dari konstruksi makna yang dipengaruhi oleh kepentingan institusional dan konteks sosial-politik. Penggunaan eufemisme secara sistematis terbukti memainkan peran strategis dalam membingkai isu, baik untuk meredam potensi konflik, menjaga citra institusi, maupun mengarahkan persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Di satu sisi, eufemisme berfungsi sebagai alat mitigasi emosional dalam pemberitaan; di sisi lain, praktik ini berpotensi mengaburkan fakta dan membatasi objektivitas informasi. Dengan demikian, eufemisme dalam media massa tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga menyangkut dinamika kekuasaan dan kontrol atas narasi publik.

Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo telah menjadi diskursus publik yang kontroversial dalam lanskap digital Indonesia. Polemik ini kerap mencuat dan memantik perdebatan di berbagai platform media digital. Meskipun telah ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah dan institusi pendidikan terkait, keraguan di kalangan sebagian masyarakat masih persisten, diperparah oleh diseminasi narasi tandingan di

media alternatif dan platform media sosial. Aspek menarik dari fenomena ini adalah kecenderungan media arus utama dalam menggunakan pilihan diksi yang lunak, netral, atau bahkan implisit bersifat sindiran dalam pemberitaannya. Hal ini kontras dengan implikasi hukum dan kredibilitas yang melekat pada isu tersebut, mengingat posisinya sebagai pemimpin negara. Implikasi dari pola pemberitaan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dinamika konstruksi realitas media terhadap isu-isu politik sensitif di Indonesia.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dari beberapa peneliti sebelumnya terkait praktik eufemisme, dalam konteks khusus isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Qabliah & Salam (2025) telah melakukan kajian terhadap media Tribun Timur. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa eufemisme digunakan untuk membingkai isu dengan gaya bahasa netral, tanpa menyebut secara eksplisit dugaan pelanggaran hukum. Penelitian tersebut merupakan salah satu yang pertama mengangkat kasus ini secara eksplisit, namun cakupannya terbatas pada satu media dan tidak menggali secara mendalam fungsi semantik maupun konstruksi ideologis dari pilihan diksi yang digunakan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan interdisipliner. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kombinasi antara teori eufemisme dari Allan & Burridge (1991) dengan pendekatan Critical Discourse Analysis dari Norman Fairclough (2010), yang memungkinkan analisis tidak hanya pada level leksikal, tetapi juga pada struktur wacana dan konteks ideologis yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini juga mengambil data dari dua jenis media yang kontras: media arus utama (seperti Tribun Timur, Kompas, dan Tempo) dan media alternatif (seperti kanal *YouTube* Sastra Miring dan Refly Harun),

sehingga memungkinkan perbandingan narasi dan pembingkaiannya secara lebih luas dan representatif.

Lebih jauh, penelitian ini tidak sekadar menginventarisasi bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan media dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo, tetapi juga menganalisis fungsi retorik, tujuan ideologis, dan dampaknya terhadap persepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis terhadap kajian semantik politik dan kontribusi praktis terhadap upaya peningkatan literasi kritis masyarakat dalam menghadapi wacana digital yang sarat manipulasi makna.

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo merupakan kasus linguistik-politik yang menarik untuk dikaji, karena mengandung pertarungan makna di ruang publik. Isu ini tidak hanya menyangkut persoalan legalitas atau integritas pribadi, tetapi juga melibatkan aktor politik, media, dan masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen narasi. Dalam pemberitaannya, media arus utama cenderung menggunakan kata-kata seperti “diributi”, “dipertanyakan”, atau “menuai perhatian” alih-alih menggunakan frasa yang eksplisit seperti “pemalsuan” atau “penipuan dokumen”. Sementara di media alternatif, muncul pula gaya bahasa satiris dan humor seperti akronim “TIPU UGM”, yang justru berfungsi menyampaikan kritik secara halus namun tajam.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penggunaan eufemisme dalam isu politik bukanlah tindakan kebahasaan yang polos, melainkan strategi komunikasi yang sarat perhitungan. Dalam kerangka teori Fairclough, hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa antara media, bahasa, dan pembentukan opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat bahwa bahasa yang digunakan dalam media tidak netral,

melainkan penuh dengan agenda dan kepentingan tersembunyi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo di media digital, menganalisis fungsi semantik dan pragmatik dari eufemisme tersebut, mengungkap bagaimana eufemisme menjadi bagian dari strategi pembingkai makna dan pembentukan opini publik dalam ruang digital.

Dengan menggabungkan kerangka teoritik yang kuat dan data yang kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya kajian semantik kritis, serta membantu masyarakat mengembangkan literasi wacana dalam memahami strategi kebahasaan yang digunakan media untuk memengaruhi kesadaran kolektif.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Fokus utama penelitian terletak pada pendeskripsian fenomena kebahasaan secara mendalam, terutama dalam memahami penggunaan strategi eufemisme dalam teks media digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat interpretatif dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang tidak eksplisit, menyelami konteks sosial, dan menggali nilai-nilai ideologis yang tersembunyi dalam pilihan bahasa media.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang (*embedded single case study*), di mana kasus yang diteliti secara khusus adalah bentuk dan fungsi eufemisme dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo. Studi kasus ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji secara mendalam dan kontekstual satu fenomena tertentu dalam lingkungan

alaminya. Dalam hal ini, teks-teks media yang diangkat mencerminkan representasi dari realitas sosial-politik yang sedang berlangsung di ruang publik digital.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari teks media digital yang mengangkat isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, baik dari media arus utama (mainstream) seperti Tribun Timur, Kompas, Tempo, dan Detik.com, maupun media alternatif seperti kanal *YouTube* Sastra Miring, Refly Harun, dan sejumlah konten analisis dari warga *net* yang diunggah di platform digital.

Teknik analisis data digunakan dengan kombinasi antara teori eufemisme dari Allan & Burridge (1991) dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dari Norman Fairclough (2010). Teori Allan & Burridge digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk eufemisme yang muncul, seperti: litotes (pelunakan), metafora, flipansi (humor/sindiran), eufemisme teknis, dan eufemisme pengalihan fokus. Sementara itu, teori Fairclough digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa merefleksikan relasi kekuasaan, ideologi, serta cara media mengonstruksi realitas sosial melalui teks.

Analisis dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar analisis teks, yang memuat beberapa kolom penting: (1) kutipan teks asli, (2) bentuk eufemisme yang digunakan, (3) fungsi atau tujuan dari eufemisme tersebut, (4) konteks sosial-politik saat teks diproduksi, dan (5) interpretasi makna yang tersembunyi. Instrumen ini tidak hanya membantu dalam proses klasifikasi, tetapi juga mempermudah peneliti dalam menjaga sistematika analisis agar tetap fokus dan terarah.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana media digital

memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi publik melalui penggunaan bahasa yang penuh pertimbangan, khususnya melalui strategi eufemisme. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bentuk linguistik eufemisme itu sendiri, tetapi juga pada fungsi retorik dan ideologisnya dalam membingkai isu politik sensitif, yakni tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Berdasarkan analisis wacana semantik terhadap sejumlah sumber dari media arus utama dan media alternatif, ditemukan bahwa bentuk dan fungsi eufemisme yang digunakan sangat beragam dan sarat makna, sebagaimana dijelaskan secara sistematis berikut ini:

1. Litotes sebagai Strategi Pelunakan Makna untuk Meredam Ketegangan Publik

Litotes merupakan bentuk eufemisme yang mengekspresikan sesuatu secara lebih halus atau melemahkan intensitas makna aslinya. Litotes menjadi bentuk eufemisme paling dominan yang digunakan media, khususnya media arus utama. Bentuk ini muncul dalam penggunaan frasa-frasa seperti “isu ijazah dipertanyakan”, “diributi”, “viral kembali”, dan “menjadi sorotan”. Ungkapan diksi dari frasa tersebut merupakan bentuk litotes yang secara implisit mengaburkan makna asli dari situasi yang sebenarnya lebih serius, seperti “pemalsuan dokumen”, “dugaan kriminal”, atau “penipuan publik”. Diksi tersebut secara semantik bekerja untuk menurunkan intensitas makna dan menghindarkan pembaca dari kesan adanya pelanggaran hukum serius.

Secara semantik, litotes dalam kasus ini mengandung pergeseran makna dari konotasi negatif dan tegas menuju konotasi lunak dan netral. Misalnya dari penggunaan diksi: “dipertanyakan” menyiratkan keraguan, bukan tuduhan; “diributi” menekankan respons publik, bukan

substansi kesalahan; “viral kembali” menyoroti dinamika media sosial, bukan peristiwa hukum. Secara pragmatik, strategi ini digunakan untuk menghindari konfrontasi langsung, menjaga keseimbangan komunikasi, dan memberikan kesan objektivitas atau netralitas media. Tujuan komunikatifnya adalah: (1) mengurangi ketegangan emosional masyarakat; (2), menjaga hubungan baik media dengan institusi kekuasaan; (3) menghindari pelabelan yang bisa menimbulkan tuntutan hukum atau *backlash* politik.

Eufemisme litotes di sini merupakan bagian dari strategi *framing*, di mana realitas dikonstruksi secara selektif melalui pemilihan diksi. *Framing* ini dilakukan bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga: (1) mengarahkan cara berpikir publik bahwa isu ijazah adalah wacana yang ambigu, tidak cukup kuat untuk dijadikan persoalan hukum; (2) mengamankan citra Presiden, dengan tidak menyebutkan secara eksplisit dugaan pelanggaran hukum; (3) menyusun batas diskursus publik, agar masyarakat memaknai isu ini dalam koridor yang lebih “aman” dan “terkontrol”. Praktik ini mencerminkan bagaimana media dapat menjadi alat legitimasi, bukan hanya pelapor fakta. Strategi litotes menyamarkan intensitas isu dan memberi kesan bahwa tidak ada yang benar-benar salah secara hukum atau moral.

Penggunaan litotes sebagai strategi eufemistik dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo menunjukkan fungsi pelunakan makna sebagai mekanisme pelindung, baik terhadap institusi negara maupun terhadap stabilitas opini publik. Litotes bekerja secara semantik untuk mengurangi beban makna dan secara pragmatik untuk membentuk persepsi yang lebih netral terhadap persoalan serius. Dalam konteks *framing* media, strategi ini

berfungsi untuk menciptakan narasi yang aman dan terkendali di tengah potensi kegaduhan politik.

2. Metafora sebagai Alat *Reframing* dan Abstraksi Substansi Masalah

Metafora digunakan sebagai bentuk eufemisme yang tidak hanya memperhalus makna, tetapi juga mengaburkan fakta dengan membingkai isu secara simbolik dan imajinatif. Contoh diksi metaforis dalam data: “residu politik masa lalu” dan “kabut narasi digital”. Kedua ungkapan ini menggantikan istilah yang lebih eksplisit seperti “kasus hukum yang belum tuntas” atau “kebohongan publik terkait ijazah”. Artinya, realitas konkret dialihkan ke dalam ranah imajiner dan interpretatif, yang cenderung melemahkan urgensi dan signifikansi hukum dari isu.

Secara Semantik, penggunaan metafora “Residu” bermakna sisa, limbah, atau bekas yang tidak lagi aktif. Digunakan dalam konteks politik, ini menyiratkan bahwa persoalan ijazah bukan lagi masalah utama, melainkan hanya efek samping yang tidak layak diperhatikan secara serius. “kabut narasi digital” menggambarkan keadaan yang buram dan tidak pasti, menurunkan kejelasan terhadap substansi fakta. Ungkapan-ungkapan ini mengalihkan makna dari ranah faktual-legal ke ranah abstrak-simbolik, sehingga pembaca tidak lagi memproses berita sebagai urgensi hukum, melainkan sebagai “wacana samar” atau “perdebatan usang”.

Secara Pragmatik, penggunaan metafora ini memiliki fungsi strategis komunikasi, yaitu: (1) merelatifkan pentingnya isu, agar tidak dianggap prioritas dalam opini publik; (2) membingkai isu sebagai kenangan konflik lama, bukan sebagai tuntutan hukum masa kini; (3) mengalihkan tekanan terhadap pemerintah atau Presiden, dengan menggiring makna ke arah narasi politis dan historis, bukan legal.

Peran dalam *framing* media dan

pembentukan opini publik. Metafora-metafora ini merupakan bagian dari strategi *reframing*, yakni teknik memosisikan ulang cara pandang publik terhadap sebuah isu. Dalam kasus ini, media: (1) menggeser fokus isu dari ranah hukum ke ranah simbolik dan politis; (2) menanamkan kesan bahwa isu ini hanyalah riak lama yang muncul kembali karena momen politik, bukan karena adanya masalah substansial; (3) membingkai publik sebagai bingung atau salah arah karena “kabut narasi”, seolah-olah wacana ini hanya distorsi, bukan refleksi masalah sebenarnya. Secara ideologis, strategi ini digunakan untuk: (1) melemahkan daya kritis publik; (2) mengamankan aktor politik tertentu; dan (3) menghindari eskalasi narasi hukum yang berpotensi merugikan pemerintah.

Penggunaan eufemisme metaforis dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo merupakan strategi media yang mengalihkan substansi hukum menjadi wacana simbolik yang kabur. Metafora seperti “residu” dan “kabut” digunakan untuk membentuk persepsi bahwa isu tersebut bukan lagi hal penting atau dapat dipercaya. Secara semantik, metafora ini mengaburkan makna asli; secara pragmatik, ia berfungsi melindungi aktor politik dari sorotan hukum; dan secara wacana, ia menjadi instrumen *framing* untuk membentuk realitas publik yang lebih lunak, ambigu, dan tidak mengancam.

3. Flipansi sebagai Sindiran dan Humor Politik yang Efektif di Media Alternatif

Flipansi merupakan bentuk eufemisme yang menggunakan gaya ringan, ironi, atau humor untuk menyampaikan makna yang sebenarnya serius dan kritis. Dalam konteks ini, akronim seperti: “TIPU UGM” (singkatan dari “Tidak Pernah UGM”), merupakan representasi paling jelas dari eufemisme jenis ini. Bentuk tersebut menggantikan tuduhan eksplisit seperti “pemalsuan riwayat pendidikan” atau

“pembobongan publik”, namun tetap menyampaikan substansi tuduhan secara tersirat.

Secara Semantik, ungkapan “TIPU UGM” berisi permainan kata yang bersifat konotatif. Kata “TIPU” sebagai bentuk verbal langsung digabungkan dengan “UGM,” mengesankan bahwa kebohongan itu berkaitan langsung dengan institusi pendidikan. Makna semantik dari akronim ini: (1) “TIPU” mengandung tuduhan penipuan (makna kuat); (2) “UGM” simbol otoritas akademik dan legitimasi pendidikan; (3) Gabungan keduanya menyiratkan keraguan terhadap keaslian ijazah, namun disampaikan dalam bentuk yang lucu tapi menyengat.

Secara Pragmatik, penggunaan eufemisme flipansi memiliki fungsi ganda: (1) menghindari jeratan hukum, karena tidak secara eksplisit menuduh atau menulis pernyataan langsung yang dapat dikriminalisasi; (2) meningkatkan daya sebar pesan, karena humor dan ironi lebih mudah viral, lebih cepat dipahami, dan lebih membekas secara emosional. Flipansi menjadi sarana komunikasi resistif, ia menyuarakan perlawanan dengan cara yang tidak frontal, namun efektif dalam mengusik makna dominan.

Flipansi di media alternatif dan media sosial mencerminkan *framing* kontra-wacana (*counter-discourse framing*), yang berbeda dengan *framing* di media arus utama. Dalam hal ini: (1) humor dan ironi digunakan untuk membongkar atau menantang narasi resmi, terutama yang berusaha menutupi substansi masalah; (2) media sosial menjadi ruang produksi makna alternatif, di mana publik bisa menyampaikan kecurigaan, kritik, atau protes terhadap kekuasaan secara lebih bebas; (3) akronim seperti “TIPU UGM” bukan hanya lucu, tetapi juga membangun narasi alternatif tentang ketidakadilan atau ketidakjujuran kekuasaan, yang bisa memengaruhi persepsi masyarakat secara

luas. Flipansi secara tidak langsung: (1) mendelegitimasi narasi resmi; (2) meningkatkan literasi kritis publik; (3) menciptakan ruang diskursif yang lebih egaliter, di mana kritik tidak harus tunduk pada format-formal jurnalistik.

Penggunaan flipansi sebagai bentuk eufemisme di media alternatif menunjukkan dinamika pergeseran strategi komunikasi publik di era digital. Dalam konteks isu ijazah Presiden Joko Widodo, bentuk seperti “TIPU UGM” secara semantik menyampaikan kritik yang tajam dan secara pragmatik memungkinkan publik menghindari represi hukum sambil tetap mengungkapkan kecurigaan. Flipansi berperan sebagai alat *framing* kontra-wacana yang memperkuat daya kritis masyarakat dan menunjukkan adanya ketegangan antara narasi resmi negara dan suara publik dalam ruang digital.

4. Eufemisme Teknikal: Ilmiah di Permukaan, Ambigu dalam Makna

Eufemisme teknikal merujuk pada penggunaan istilah teknis, akademik, atau ilmiah dalam pemberitaan untuk menggantikan bahasa yang lebih eksplisit dan tajam. Dalam data, istilah seperti: “kontroversi digital”, “narasi belum terverifikasi”, “klaim yang berkembang di ruang media sosial”, menggantikan istilah eksplisit seperti “pemalsuan dokumen”, “dugaan kriminal akademik”, atau “penipuan ijazah”. Jenis eufemisme ini banyak ditemukan di media arus utama yang mengklaim menjunjung tinggi prinsip objektivitas, padahal sebenarnya menggunakan istilah akademis sebagai alat untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik makna.

Secara Semantik, (1) “kontroversi digital” mengalihkan makna dari konflik hukum ke perdebatan daring, (2) “narasi belum terverifikasi” memindahkan tuduhan menjadi spekulasi; tidak membahas substansi, melainkan status validasi, (3)

“klaim yang berkembang” memberi kesan bahwa tuduhan adalah rumor atau desas-desus, bukan fakta yang perlu diverifikasi. Secara semantik, istilah ini mengaburkan makna nyata dari tuduhan atau persoalan hukum dan mengemasnya dalam istilah yang longgar, netral, dan ambigu.

Secara Pragmatik, penggunaan istilah teknis memiliki fungsi pragmatik sebagai strategi komunikasi redaksional, yakni: (1) menampilkan kesan objektivitas dan profesionalitas, meskipun secara implisit sedang menghindari tanggung jawab penyampaian makna secara transparan; (2) menjaga jarak editorial dari isu yang sensitif untuk melindungi institusi media dari risiko hukum atau tekanan politik; (3) menciptakan zona netral (*buffer zone*) yang membatasi keterlibatan publik secara emosional atau kritis terhadap substansi permasalahan.

Eufemisme teknis merupakan bagian dari *framing* institusional yang digunakan untuk: (1) Menunda atau menahan arus reaksi publik terhadap isu, dengan memosisikannya sebagai “perdebatan data” alih-alih “permasalahan hukum konkret.”; (2) mengontrol persepsi pembaca, sehingga mereka lebih fokus pada sisi “ketidakjelasan informasi” ketimbang pada substansi kebenaran; (3) menghindari dorongan klarifikasi atau investigasi mendalam dari masyarakat terhadap lembaga yang dituduh. Strategi ini sangat khas pada media yang ingin mempertahankan legitimasi profesional, tetapi sekaligus berhati-hati dalam menyikapi isu yang bisa menyudutkan kekuasaan atau institusi negara.

Eufemisme teknis dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo adalah strategi linguistik yang dikemas dalam balutan objektivitas ilmiah, namun menyimpan ambiguitas makna. Istilah teknis seperti “kontroversi digital” dan “narasi belum terverifikasi”

menampilkan jarak makna yang menghindari substansi hukum. Secara semantik, strategi ini mengaburkan makna asli; secara pragmatik, ia menjaga jarak aman media dari konflik politik; dan secara wacana, ia menjadi alat *framing* untuk mengontrol persepsi publik, memperlambat reaksi kritis, dan menjaga stabilitas narasi dominan.

5. Pengalihan Fokus (*Deflective Euphemism*) sebagai Strategi Pengendalian Wacana

Deflective euphemism adalah jenis eufemisme yang tidak langsung menghaluskan makna pernyataan, tetapi mengalihkan arah makna dari substansi ke konteks lain, dalam hal ini motif politik lawan. Ungkapan yang dikategorikan sebagai *deflective euphemism* dalam data: (1) isu ini sengaja dimunculkan untuk mendiskreditkan Presiden menjelang pemilu; (2) narasi ini dimanfaatkan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah. Keduanya tidak menyentuh pokok persoalan (keaslian ijazah), melainkan memindahkan fokus kepada intensi pihak pengkritik. Hal ini adalah bentuk pengalihan yang menghindari pembahasan isi secara langsung, tapi tetap membentuk opini publik terhadap arah diskusi.

Secara Semantik, frasa seperti “dijadikan alat untuk mendiskreditkan” dan “dimanfaatkan oposisi” menekankan pada niat politik pihak lain, bukan kebenaran substansi. Di samping itu, diksi ini berfungsi untuk menutup akses terhadap inti permasalahan, yaitu keaslian dokumen atau transparansi akademik.

Secara Pragmatik, *deflective euphemism* memiliki fungsi retorik yang sangat strategis yaitu: (1) menurunkan urgensi substansi diskusi dengan menggiring opini bahwa permasalahan tersebut hanya “alat politik”; (2) mendeligitimasi pihak pengkritik, sehingga publik tidak lagi fokus pada kebenaran, tetapi pada niat di balik kritik; (3) menanamkan kecurigaan terhadap suara

alternatif, yang pada akhirnya bisa mengikis semangat partisipasi publik dalam diskusi kritis. Dengan kata lain, strategi ini adalah mekanisme kontrol makna, yang menghalangi publik mengakses inti persoalan dengan cara mendiskreditkan sumber kritik.

Penggunaan eufemisme deflektif adalah bentuk *framing* yang bekerja dengan cara manipulatif, bukan pada bentuk bahasa semata, tetapi pada arah interpretasi publik. Peran *framing* dalam hal ini meliputi: (1) mengontrol arah diskusi publik, agar tidak masuk ke substansi (misalnya keabsahan ijazah), tetapi hanya terjebak dalam perdebatan motif dan politisasi; (2) menyempitkan ruang wacana kritis, karena siapa pun yang mempertanyakan isu dapat dituduh memiliki agenda politik tersembunyi; (3) menstigmatisasi oposisi sebagai sumber kegaduhan, bukan sebagai bagian dari *check and balance* demokrasi. Dalam kerangka opini publik, *deflective euphemism* menyebabkan: (1) penurunan kepercayaan publik terhadap kritik yang sah; (2) penguatan citra pemimpin sebagai korban politisasi, bukan objek evaluasi; (3) terbentuknya iklim diskusi yang defensif dan antipati terhadap oposisi, yang menguntungkan kekuasaan dominan.

Deflective euphemism merupakan strategi eufemistik yang tidak bekerja melalui pelunakan bahasa secara langsung, melainkan melalui pengalihan fokus makna. Dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo, penggunaan frasa seperti “upaya mendiskreditkan menjelang pemilu” atau “dimanfaatkan oposisi” mencerminkan taktik retorik untuk menghindari konfrontasi dengan fakta dan mengarahkan publik pada pembacaan politis semata. Secara semantik, strategi ini mengaburkan makna asli; secara pragmatik, strategi ini mendeligitimasi kritik; dan secara wacana, strategi ini menjadi instrumen *framing* yang meminimalkan ruang untuk evaluasi

rasional dan kritis dari masyarakat terhadap isu yang seharusnya diselidiki secara objektif.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eufemisme dalam pemberitaan digital terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo berperan sentral dalam pembentukan narasi, pengelolaan opini publik, dan strategi *framing* media. Lima pola utama eufemisme yang ditemukan – litotes, metafora, flipansi, eufemisme teknikal, dan pengalihan fokus (*deflective*), menggambarkan kompleksitas dan kepentingan ideologis dalam praktik pemberitaan isu sensitif.

1. Litotes berfungsi sebagai alat pelunakan makna yang meredam intensitas semantik. Strategi ini menurunkan bobot tuduhan (misalnya, dari “pemalsuan ijazah” menjadi “isu yang dipertanyakan”), sehingga menjaga kesan netralitas. Litotes digunakan media arus utama untuk menstabilkan opini publik dan menghindari tekanan politik atau hukum.
2. Metafora merepresentasikan bentuk *reframing* simbolik yang mengalihkan makna dari fakta konkret ke ranah imajinatif. Istilah seperti “residu politik” dan “kabut narasi digital” digunakan untuk mengaburkan substansi masalah, menurunkan urgensi hukum, serta menampilkan isu sebagai perdebatan usang atau tidak relevan.
3. Flipansi, yang lazim di media alternatif, merupakan bentuk eufemisme satir atau ironis yang menyampaikan kritik serius secara jenaka. Akronim seperti “TIPU UGM” menunjukkan adanya bentuk perlawanan naratif terhadap wacana dominan melalui media sosial. Strategi ini memperkuat *framing* kontra-wacana serta meningkatkan literasi kritis masyarakat secara non-konfrontatif.
4. Eufemisme teknikal mengandalkan istilah

akademik untuk memberi kesan objektivitas, namun secara substansial menghindari makna eksplisit. Frasa seperti “narasi belum terverifikasi” atau “kontroversi digital” menjadi mekanisme perlindungan media terhadap konflik politik, sekaligus instrumen pembungkaman makna yang menunda reaksi publik dan mencegah keterlibatan emosional.

5. Pengalihan fokus (*deflective euphemism*) bekerja dengan menggeser perhatian publik dari substansi ke motif politik. Ungkapan seperti “narasi ini sengaja dimunculkan untuk menyerang Presiden” menjauhkan wacana dari pertanyaan tentang validitas dokumen. Strategi ini mendeligitimasi kritik dan mempersempit ruang wacana rasional, menjadikan publik lebih sinis terhadap suara oposisi.

Secara keseluruhan, kelima bentuk eufemisme ini tidak hanya menjadi sarana retorika, melainkan juga alat hegemonik dalam konstruksi makna publik. Dalam ranah isu politik dan hukum yang melibatkan tokoh negara, eufemisme berperan sebagai instrumen efektif dalam mengendalikan diskursus publik. Strategi ini, alih-alih melakukan penyensoran eksplisit, secara subtil membentuk persepsi, penilaian, dan bahkan keraguan publik terhadap suatu permasalahan, Santoso, (2021). Studi mengenai pemberitaan isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo secara empiris menunjukkan bahwa eufemisme menjadi strategi linguistik yang dominan dan berhasil membingkai ulang makna, menyamarkan intensi, serta mengarahkan opini publik sesuai dengan agenda produsen wacana, Qabliyah & Salam, (2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan juga sebagai aktor aktif dalam produksi makna sosial, politik, dan ideologis yang disalurkan secara implisit melalui penggunaan bahasa.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian linguistik media

dengan menegaskan bahwa bahasa bukan semata-mata cermin kenyataan, melainkan juga arena perebutan makna. Dalam konteks media digital, eufemisme muncul sebagai strategi adaptif yang digunakan media untuk menavigasi kompleksitas antara kepentingan editorial, tekanan politik, dan ekspektasi publik. Pilihan diksi dalam pemberitaan tidak lagi sekadar soal keakuratan informasi, tetapi menjadi bentuk pertimbangan strategis untuk menjaga posisi dan kredibilitas media di tengah persaingan wacana yang ketat dan penuh tekanan, Aliyamsyah Siregar, (2025). Dengan demikian, praktik eufemisme perlu dipahami bukan hanya sebagai fenomena linguistik, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian makna (*meaning control*) yang memainkan peran sentral dalam politik bahasa, Anshori, (2020). Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa media memiliki fungsi ideologis yang kuat dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi arah diskursus sosial-politik kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eufemisme digunakan secara strategis oleh media digital dalam pemberitaan isu ijazah Presiden Joko Widodo untuk membingkai makna, meredam konflik, dan memengaruhi persepsi publik. Lima bentuk utama eufemisme yang teridentifikasi yaitu litotes, metafora, flipansi, eufemisme teknis, dan pengalihan fokus, berperan signifikan dalam menciptakan kesan netralitas, mengaburkan substansi, serta menjaga stabilitas narasi politik di ruang media daring. Penggunaan strategi ini mencerminkan kalkulasi ideologis dan kepentingan institusional media dalam mengarahkan opini publik.

Dengan demikian, eufemisme tidak dapat dipandang semata sebagai gaya bahasa, melainkan sebagai instrumen wacana yang efektif dalam pengendalian makna dan pembentukan realitas sosial. Pilihan kata yang halus, metaforis, atau teknis digunakan

untuk menghindari konflik terbuka, menjaga citra tokoh politik, atau bahkan menunda respons kritis dari masyarakat. Bahasa media terbukti tidak netral, melainkan menjadi alat konstruksi wacana yang sarat dengan kepentingan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media dan literasi kritis yang kuat dalam menyikapi pemberitaan, agar mampu mengenali strategi eufemistik yang digunakan media serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang telah dibingkai secara halus. Sebab, bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap realitas sosial dan politik.

REFERENSI

- Allan, K., & BurrIDGE. (1991). *Euphemism & Dysphemism Language Used as Shield and Weapon*. Edisi 1, Oxford University. Oxford.
- Aliyamsyah Siregar, I., Anrial, A., & Valentine, F. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Kompas.com dan Metrotvnews.com dalam Isu Politik terhadap Polarisasi Pemilih dalam Pemilu 2024. (*Edisi Januari 2024*) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Anshori, D. S. (2020). *Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azaky, A., Mulya, O. H., & Hermendra, H. (2024). Eufemisme dalam pidato Soekarno pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. *Jurnal Basataka (JBT)*, 7(2), 688–698.
- Az-zahra, S. F., Nadra, N., & Noviatry, N. (2021). Eufemisme dalam Pemberitaan Krisis Kemanusiaan Wamena di Media Daring. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(2), 261–275.
- Mardhiah, N. Y. (2022). Penggunaan Eufemisme pada Kolom Berita Utama Padang Ekspres. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28–36.
- Pratama, R. (2023). Analisis Framing Media terhadap Isu Ijazah Presiden Joko Widodo di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 9(1), 23–36.
- Qabliah, I., & Salam, N. A. (2025). Penggunaan Eufemisme dalam Berita Online Dugaan Ijazah Palsu Presiden Joko Widodo pada Media Tribun Timur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 303–314.
- Santoso, S. (2021). Analisis Resepsi Audiens terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(2), 140–154.
- Sariah. (2017). Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam Berita Politik Koran Tempo. *Metalingua*, 15(1), 87–102.
- Sobur, A. (2018). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yulianti, F., & Supriyadi, T. (2020). Semantik dalam Media Massa: Strategi Bahasa dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Bahasa dan Media*, 14(1), 45–60.